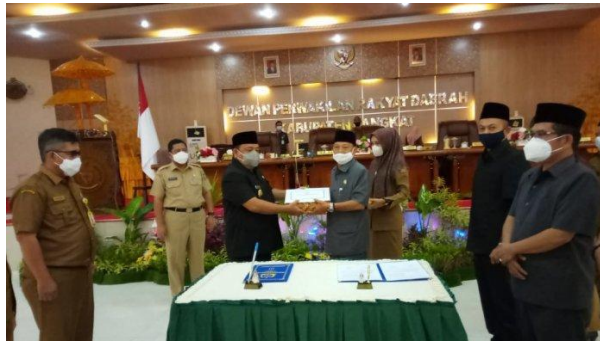


Bupati Sampaikan Ranperda APBD Langkat Tahun 2021, Besarnya 1,8 Triliun



Sumber Berita: <https://medan.tribunnews.com>

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin menyampaikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Langkat TA 2021 dalam paripurna bersama DPRD Langkat.

Paripurna ditandai penandatanganan nota kesepatakan Ranperda APBD Kabupaten Langkat antara Bupati dan Ketua DPRD Langkat Surialam. Bupati menyampaikan, Ranperda APBD Langkat 2021 senilai Rp1.821.274.173.308.

"Perumusan arah kebijakan umum APBD Langkat TA 2021 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas sesuai visi Pemkab Langkat yakni menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan," kata Bupati Langkat, Selasa (24/11/2020).

Dikatakan Terbit, untuk konsep APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemda Langkat dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam penyusunan APBD Langkat TA 2021.

Bupati berharap kepada DPRD Langkat, segera membahas bersama antara Badan Anggaran Legislatif dengan tim Anggaran Pemda. Selanjutnya mendapatkan persetujuan dan penetapan dari DPRD Langkat untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Langkat TA 2021.

Ketua DPRD Langkat, Surialam selaku pimpinan rapat menyampaikan, paripurna ini dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Langkat Nomor 900-2043/BPKAD/2020 tanggal 17 November 2020 perihal penyampaian R APBD TA 2021, yang kemudian dikeluarkannya rekomendasi Nomor 14/BAPEMPERDA/DPRD/2020 untuk diparipurnakan. Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Langkat, di Gedung DPRD Langkat, Stabat.

Bupati mendengarkan pandangan umum dari 8 fraksi DPRD Langkat, yakni Fraksi Gerindra disampaikan Rahmanuddin Rangkuti, Fraksi Golkar Sri Bana PA, fraksi PDI P disampaikan Juriah, Fraksi Partai Demokrat Agus Salim, fraksi Keadilan, Pembangunan dan Kebangsaan (KPK) disampaikan Dedi, fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI) disampaikan Risna Lela Sari, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan Samsul Rizal dan fraksi Nasdem disampaikan Sukardi.

Setelah disampaikan, Surialam meminta kepada Bupati Langkat untuk memberikan jawabannya atas pandangan umum dari fraksi pada 24 November 2020 mendatang. Selanjutnya akan dijadwalkan paripurna bersama lagi.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/11/24/bupati-sampaikan-ranperda-apbd-langkat-tahun-2021-besarnya-18-triliun>, tanggal 24 November 2020.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Bupati-Langkat-Sampaikan-RAPBD-2021-Rp-1-8-Triliun>, tanggal 24 November 2020;

Catatan:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 Angka 2, 3, 4 dan 32

2. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
4. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
32. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.*
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.*

Pasal 65 ayat (1) dan (2)

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;*
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;*
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*

- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 91 ayat (1) dan (2)

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 104 ayat (1)

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 105

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Pasal 106 ayat (1) dan (2)

(1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 8, 9, 28, 50 dan 54

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

50. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17

- (1) *Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.*
- (2) *Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.*
- (3) *Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.*

Pasal 22

- (1) *Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:*
- a. pendapatan daerah;*
 - b. belanja daerah; dan*
 - c. pembiayaan daerah*
- (2) *Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*